

**IMPLEMENTASI LAYANAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR MENGGUNAKAN APLIKASI SIGNAL  
DI UPPD SAMSAT KOTA BANJARBARU**

Annisa Rizqi<sup>1</sup>, Akhmad Nikhrawi Hamdie<sup>2</sup>, Fakhsiannor<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Administrasi Publik, Fisip, Uniska, NPM. 19 12 0138

<sup>2</sup>Ilmu Administrasi Publik, Fisip, Uniska, NIDN. 11 0502 6401

<sup>3</sup>Ilmu Administrasi Publik, Fisip, Uniska, NIDN. 11 2010 6301

Email: [annisarizqi2203@gmail.com](mailto:annisarizqi2203@gmail.com)

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana implementasi layanan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan Aplikasi Signal di UPPD Samsat Kota Banjarbaru. Serta untuk menjelaskan bagaimana hambatan penerapan layanan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan Aplikasi Signal di UPPD Samsat Kota Banjarbaru. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dengan cara wawancara langsung kepada tiga orang informan. Analisis data menggunakan reduksi data, kemudian menyajikan data, hingga menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi layanan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan Aplikasi Signal di UPPD Samsat Kota Banjarbaru dapat diketahui Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas dari layanan Signal di UPPD Samsat Banjarbaru sudah berjalan dengan baik dengan diberikannya kemudahan wajib pajak dalam mengakses pembayaran PKB melalui aplikasi kapan saja dan dimana saja serta tidak perlu lagi datang mengurus ke Samsat langsung. Serta terdapat beberapa hambatan dalam penerapannya seperti sering adanya kendala jaringan, kendala waktu pengiriman dan kendala pemahaman pengguna.

**Kata Kunci :** *Implementasi, Pajak Kendaraan Bermotor, Signal.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Arribe, E., & Aulia, S. (2022). ANALISIS TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA APLIKASI SIGNAL NASIONAL MENGGUNAKAN METODE END USER COMPUTING SATISFACTION (EUCS) (Studi Kasus: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau (BAPENDA)). *Journal of Software Engineering and Information Systems (SEIS)*, 86-95.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
- Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0159 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah UPPD Banjarbaru Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang pembentukan, organisasi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan.
- Rukin, S. P. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakad Media Publishing.
- Samsat Digital Nasional. (2021). (<https://samsatdigital.id>), diakses pada 30 Maret 2023.
- Sayidah, N. (2018). Metodologi penelitian disertai dengan contoh penerapannya dalam penelitian.
- SIGNAL. (2022). (<https://bapenda.baliprov.go.id/signal-samsat-digital-nasional/>), diakses pada 7 Juli 2023
- Silamukti, A. A., Mayastinasari, V., & Aminanto, E. (2022). *The Implementation of The National Digital Samsat (Signal) Program in Polda Metro Jaya Jurisdiction from A Systemic Perspective. Policy, Law, Notary and Regulator Issues (Polri)*, 1(3), 59-68.
- Solikhah, K. (2021). Pengaruh Penerapan E-Samsat, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam.
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Penyelenggara Berkewajiban.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.